

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya laju pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia dewasa ini, perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi yang semakin pesat menuntut sebuah perusahaan atau organisasi mampu menghadapi tantangan berupa persaingan bisnis yang ketat, yang menuntut perusahaan harus mampu menjawab tantangan tersebut. Saat ini dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi yang belum dapat dihasilkan oleh produsen di dalam negeri, maka didatangkanlah barang-barang dari negara lain (impor). Hal ini mengakibatkan volume perdagangan Indonesia dengan dunia internasional juga berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun.

Meningkatnya perdagangan nasional dan internasional tersebut, serta masuknya Indonesia dalam perdagangan dunia yang bebas dan mengarah dalam bentuk kompetisi global serta tidak mengenal batas wilayah lagi (*borderless*), maka tantangan di era ekonomi global dan perdagangan bebas itu bukan terletak pada kualitas barang dan bukan pula harga yang kompetitif, tetapi yang paling kritis di antara semua ini adalah proses penanganan dokumen. Penanganan dokumen yang cepat, akurat, dan terotomatisasi akan mempersingkat waktu dan menurunkan biaya perusahaan, oleh karena itu kecepatan pelayanan dokumen sangat diperlukan bagi Departemen Keuangan pada umumnya dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya sebagai instansi yang memberikan pelayanan jasa kepabeanan kepada masyarakat usaha (*market forces*) di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dihadapkan pada suatu dilema. Di satu sisi untuk melaksanakan fungsi pemungutan pajak negara (berdasarkan UU No. 10 tahun 1995) dalam bentuk pemungutan bea masuk atas barang impor dan pengawasan lalu lintas barang di wilayah pabean Republik Indonesia, administrasi pabean harus melakukan pemeriksaan pabean seakurat mungkin. Di sisi lain untuk memperlancar arus barang, intervensi administrasi pabean dalam melakukan pemeriksaan barang harus dilakukan seminimal mungkin.

Untuk mengatasi dilema tersebut, administrasi pabean diharapkan dapat memberikan fasilitas perdagangan dalam bentuk mempercepat pelayanannya sehingga akan mempercepat arus barang dan dokumen namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam mengamankan hak negara dari kemungkinan tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Administrasi pabean memerlukan suatu sarana yang dapat memenuhi kebutuhan untuk penyederhanaan proses pelayanan dan pemberian fasilitas serta penerapan sistem pelayanan dokumen yang terintegrasi dan cepat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kepabeanan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan kepabeanan yang telah dijalankan adalah pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan sistem *Electronic Data Interchange* (EDI). Dengan sistem EDI, administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan antara lain perusahaan pelayanan, importir, eksportir, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

(PPJK), dan ditransmit secara elektronik. Sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*, dimana dalam proses *re-entry* tersebut mungkin dapat terjadi *human error* seperti kesalahan pengetikan data, selain itu juga menambah waktu pengerjaan. Secara fundamental, diberlakukannya sistem EDI dalam prosedur kepabeanan merupakan salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini DJBC untuk memanfaatkan teknologi informasi guna mengefisienkan pelayanan yang diberikan.

Sistem yang sudah berlangsung beberapa dekade yang lalu, semula dikembangkan melalui sistem telekomunikasi telepon. Sebenarnya EDI diambil dari Sistem Informatika Manajemen, khususnya dalam jual beli barang yang dapat secara cepat, sederhana, dan tanpa kertas (*paperless*). Transaksi jual beli dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu penjual dan pembeli, secara langsung dan tanpa hambatan.

Sistem elektronik melalui komputer yang semula digunakan di dunia perdagangan, selanjutnya diadopsi untuk pelayanan kepabeanan. Sejak 9 Februari 2004 di Pelabuhan Tanjung Priok sistem EDI mulai diterapkan. EDI adalah sarana vital bagi kepabeanan, baik untuk peningkatan pelayanan maupun kelancaran pemeriksaan administrasi dan arus barang. EDI memberikan kesempatan kepada importir atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan untuk mentransmit informasi dari satu komputer ke komputer lainnya secara cepat, mudah, akurat.

Pemakaian komputer ini juga disebut *Accelerated Commercial Release Operation Support System* (ACCROS), memungkinkan importir atau PPJK

memberitahukan data-data mengenai jenis barang, klasifikasi tarif, harga barang yang diimpornya, baik melalui disket ataupun langsung kepada komputer yang ada di kantor pabean, baik melalui sistem informatika yang menghubungkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan tujuan, maupun bisa melalui ‘warung EDI’.¹ Manfaat penggunaan sistem EDI secara administratif tidak ada pengulangan pemasukan (*reentry*) data, kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalkan, tanpa menggunakan kertas (*paperless*), dan tepat waktu (*just in time*).

Usaha meningkatkan pelayanan dengan penyerahan pemberitahuan pabean melalui media elektronik (hubungan antar komputer) menjadi latar belakang utama digunakannya Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) oleh DJBC dan menjadi batasan permasalahan dalam penulisan ini dalam menganalisis keefektifan penerapan Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) terhadap peningkatan pelayanan penyelesaian dokumen impor.

B. Permasalahan

Dalam rangka memperlancar arus barang, intervensi pabean dalam melakukan pemeriksaan barang diharapkan seminimal mungkin, oleh karena itu tanpa mengurangi kewaspadaan dalam mengamankan hak negara dari kemungkinan tindakan pelanggaran terhadap undang-undang, administrasi pabean memerlukan suatu sarana yang dapat memenuhi kebutuhan untuk penyederhanaan proses pelayanan dan pemberian fasilitas serta penerapan sistem pelayanan

¹ Ali Purwito M, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Samudra Ilmu, 2006), hal22.

dokumen yang terintegrasi dan cepat. Sistem tersebut adalah *Electronic Data Interchange* (EDI). Secara umum EDI kepabeanan dapat diartikan sebagai pertukaran data bisnis secara elektronik antar organisasi dalam bentuk yang terstruktur dan diproses melalui komputer dari suatu aplikasi bisnis ke aplikasi bisnis lainnya. Dalam bidang perdagangan, EDI dapat digunakan untuk mentransmit dokumen secara elektronik, seperti *purchase order*, *invoice* dan dokumen perdagangan lainnya.

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa Sistem EDI bukan hanya bermanfaat bagi bea dan cukai dalam memperikan pelayanan jasa kepabeanan tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan dalam menghemat biaya tinggi yang di akibatkan karena

- a. proses dokumen impor di bea dan cukai
- b. ruang dan lamanya penimbunan barang di pelabuhan

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh penerapan sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) dalam peningkatan pelayanan di KPPBC Soekarno Hatta tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan ini adalah untuk melakukan kajian tentang penerapan sistem *Electronic Data Interchange* (EDI), yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem tersebut dalam peningkatan pelayanan di KPPBC Soekarno Hatta.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain yang sejenis dan memperkaya sumber pustaka yang berkaitan dengan Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI).

2. Signifikansi Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi para Praktisi kegiatan kepabeanan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti membagi menjadi beberapa bagian, adapun sistematika dari penelitian skripsi ini disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yaitu diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori yang membahas konsep sistem informasi

manajemen, konsep pelayanan umum, dan konsep EDI. Di sini penulis mencoba mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual dan logis. Penulis juga menjelaskan metodologi yang digunakan pada penelitian ini, berdasarkan pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian, penentuan site penelitian, informan, teknik pengumpulan data, dan hipotesis kerja.

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM EDI KEPABEANAN DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A1 SOEKARNO HATTA.

Bab ini berisi gambaran umum tempat penelitian, tugas pokok, fungsi serta kedudukannya dalam struktur organisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Soekarno Hatta dan juga gambaran umum dari Sistem EDI.

BAB IV ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE* (EDI) KEPABEANAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENYELESAIAN DOKUMEN IMPOR PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A1 SOEKARNO HATTA.

Bab ini membahas seluruh uraian mengenai informasi data yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan kerangka pemikiran

peneliti, mengenai elemen-elemen yang terkait dengan pelaksanaan sistem EDI Kepabeanan dan bagaimana pengaruh penerapannya.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini, peneliti akan mencoba untuk dapat memberikan konklusi hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan saran/rekomendasi sehubungan dengan permasalahan pokok yang ada, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan arus lalu lintas impor melalui sistem EDI Kepabeanan.

